



Dulu Libatkan Paguyuban, Sekarang kok Individu

Pedagang TM 2 Belum Pernah Teken Kontrak dengan Pemprov

JOGJA - Sejumlah pedagang Teras Malioboro (TM) 2 yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma angkat bicara. Mereka secara khusus memberikan tanggapan atas pernyataan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X yang menyebut kontrak relokasi dari Teras Malioboro 2 ke Ketandan dan Beskalan dilakukan dengan individu pedagang. Bukan dengan koperasi maupun paguyuban. *Baca Dulu... Hal 7*



teras malioboro

PETISI RAKYAT: Para pedagang Teras Malioboro 2 kembali menggelar aksi di halaman Teras Malioboro 2, Kota Jogja, kemarin (17/7). Dalam aksinya mereka meminta pihak Pemprov DIJ untuk membuka ruang dialog.



MERASA TIDAK PERNAH DILIBATKAN

Seruan Para Pedagang Teras Malioboro 2

- Menyanggah pernyataan Gubernur terkait kontrak relokasi dilakukan personal pedagang bukan paguyuban.
- Belum pernah mendandatangani kontrak relokasi dari Pemprov DIJ.
- Meminta ruang dialog yang selama ini hanya satu arah.
- Menolak lokasi Ketandan karena dinilai kurang menguntungkan.
- Meminta Pemprov menunda proses relokasi dan melakukan evaluasi.

GRAFIK: HENRI KARTUNADAR JOGJA

Dulu Libatkan Paguyuban, Sekarang kok Individu

Sambungan dari hal 1

"Kami belum pernah menandatangani kontrak apapun dengan Pemprov DIJ. Kami juga tidak pernah diajak bicara hanya diminta validasi data," ucap Ketua Paguyuban Tri Dharma Supriyati di Teras Malioboro 2 kemarin (17/7).

Supriyati menegaskan punya bukti sehingga berani bicara. Saat relokasi tahap pertama yang memindahkan pedagang dari kawasan Malioboro ke Teras Malioboro 2 belum sekalipun menandatangani surat perjanjian. Diingatkan, bila kontrak dilakukan perorangan, maka semua pedagang di Teras Malioboro 2 harus dilibatkan. Soal validasi data pernah dilaku-

kan UPT Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Jogja. "Kami ingin adanya ruang dialog. Selama ini yang terjadi hanya satu arah dan sekadar sosialisasi belaka," sesalnya.

Dia juga merasa heran dengan pernyataan gubernur yang mengaku tidak tahu dengar Koperasi Tri Dharma. Padahal saat relokasi tahap pertama pemprov melibatkan Koperasi Tri Dharma dengan kepemimpinan yang lama. Kini kepemimpinan tersebut sudah tidak aktif dan sudah diganti.

"Isi perjanjian kerja samanya, kami (anggota) tidak pernah tahu. Kami hanya mengetahui dari Instagram Humas Pemprov DIJ @humasjogja pada Febru-

ari 2022 yang menandatangani ketua koperasi yang lama," jelasnya.

Supriyati menambahkan, pemprov juga pernah memberikan hibah kepada Koperasi Tri Dharma sebesar Rp 250 juta. Hibah diberikan saat pandemi Covid-19 pada 14 Agustus 2021. Dia kemudian mempertanyakan kenapa saat membahas relokasi tahap kedua ke Ketandan dan Beskalan, paguyuban maupun Koperasi Tri Dharma tidak pernah dilibatkan sejak tahap perencanaan. "Kami sangat menyayangkan statement Pak Gubernur," katanya.

Ketua Koperasi Tri Dharma Arif Usman menambahkan, tidak antirelokasi. Juga tidak antipemerintah. Mereka hanya ingin dili-

teras malioboro

batkan dalam perencanaan agar menemukan solusi untuk relokasi yang partisipatif, transparan, dan menyejahterakan pedagang. "Dari kawasan Malioboro hingga di Teras Malioboro 2 yang dilibatkan adalah pengurus paguyuban. Kenapa hari ini keluar *statement* (gubernur, Red) relokasi *person to person*," ujarnya. Staf Divisi Advokasi LBH Jogja sekaligus kuasa hukum dari Paguyuban Tri Dharma Muhammad Rakha Ramadhan mengaku kecewa dengan Pemprov DIJ dan Pemkot Jogja. Keinginan

berdialog dalam ruang partisipatif guna mencapai solusi bersama tidak pernah diindahkan. "Seharusnya pemprov dan pemkot bersikap arif dan bijak. Tapi itu tidak ada sampai hari ini!" sindirnya.

Diingatkan, masalah Teras Malioboro 2 tak kunjung selesai selama tak ada dialog antara kedua pihak. Rakha secara terbuka mendesak pemprov menunda relokasi. "Lakukan evaluasi lebih dulu," pintanya. Dikatakan, para pedagang selama ini hanya mendapatkan informasi dari media sosial bukan dari pemerintah daerah. Harusnya para pedagang adalah orang yang pertama kali tahu apapun kebijakan terkait Teras Malioboro 2. Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja

Krisnadi Setyawan mengatakan, dalam konteks administrasi semua kontrak perjanjian dilakukan antarpersonal. Tidak hanya dalam masalah relokasi Teras Malioboro 2.

Namun demikian terkait partisipasi publik harus dipandang berbeda dengan masalah administrasi. "Individu pedagang itu bersedia masuk ke relokasi Teras Malioboro 2 dari selasar Malioboro dulunya juga atas keputusan organisasi. Bukan individu," ingatnya.

Tidak paguyuban dalam proses relokasi Teras Malioboro dinilai kurang demokratis. Pasalnya, dulu saat negosiasi relokasi tahap pertama yang diundang pemprov dan pemkot adalah paguyuban dan bukan orang per orang. "Di berita

acaranya itu pun masih menyebutkan (nama) kelompok-kelompoknya," tutur wakil rakyat belatar belakang aktivis ini.

Krisnadi maupun pengurus Paguyuban Tri Dharma tidak menampik relokasi tahap pertama ke Teras Malioboro 2 bersifat sementara. Hanya yang menjadi persoalan, relokasi tahap dua tidak disebutkan di Ketandan dan Beskalan.

"Jadi begitu teman-teman tahu relokasinya di Ketandan yang tempatnya kurang menguntungkan, mereka lantas menolak," jelasnya. Informasi letak relokasi tahap kedua di Ketandan belakang Ramayana dan Beskalan mengemuka pada tahun kedua setelah para pedagang menempati Teras Malioboro 2. (oso/kus/pra/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005